

**TINJAUAN ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum

Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh

MUTIA SULFIANTI
NIM. 10400113066

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutia Sulfianti
NIM : 1040011066
Tempat/tgl lahir : Bantaeng / 29 Oktober 1995
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Griya Patri Abdullah Permai
Judul : Tinjauan Administrasi Negara Terhadap Pembatalan
Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Pengadilan
Agama Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 17 Agustus 2017

Penyusun,



Mutia Sulfianti

10400113066

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**TINJAUAN ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR)**", yang disusun oleh Mutia Sulfianti, NIM 10400113066, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Samata, Agustus 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Abdillah Mustari, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Hj. Siti Aisyah, M.A, Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Sohrah, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Awaliah Musgamy, S.Ag, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar, ✓



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

8. Kepada Ichsanul Hasba Unta, Rani, Riska dan Eka yang telah memberikan doa, dukungan serta kasih sayang dan terima kasih atas kesabaran yang tak henti-hentinya menyemangati dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis Iin Wahyuni, Hasmila Syamsi, Irna Dwi Ramadhani dan Leo Patra, Rabiatal Adawiah S,H yang terus memberikan semangat dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penyusunan penulisan skripsi ini baik secara materil maupun formil.

Semoga Allah swt. Memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang mmbangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah swt. Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermamfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua.

Wassaamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Samata, 17 Agustus 2017

Penyusun,



Mutia Sulfianti

10400113066

DAFTAR ISI

JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	4
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	11
1. Pengertian Perkawinan	11
2. Dasar Hukum Perkawinan	15
3. Hikmah dan Tujuan Perkawinan	18
4. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
5. Asas-asas Perkawinan	23
6. Perjanjian Perkawinan	25
B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan.....	27

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	27
2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam	29
3. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	32
4. Pembatalan Perkawinan Menurut UU Perkawinan	34
5. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan	38
C. Tinjauan Umum tentang Administrasi Negara.....	44
1. Pengertian Administrasi Negara.....	44
2. Syarat-syarat Pencatatan Perkawinan.....	44
3. Proses Pelayanan Pencatatan Nikah	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	46
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Jenis Sumber Data.....	47
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Instrumen Penelitian.....	49
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50
G. Pengujian Keabsahan Data.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Prosedur Pembatalan Perkawinan	54
B. Penyebab terjadinya pembatalan perkawian di pengadilan Agama Makassar.....	57

C. Pengaruh pengadministrasian negara setelah terjadi pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan akibat pembatalan perkawinan	58
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Implikasi Penelitian.....	68
KEPUSTAKAAN	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَم : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلَى : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينَ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zāid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

NAMA : MUTIA SULFIANTI
NIM : 10400113066
JUDUL : TINJAUAN ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP
PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT
HUKUMNYA (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang Tinjauan Administrasi Negara Terhadap Pembatalan Perkawinan dan Akibat hukumnya (studi Kasus Pengadilan Agama Makassar). Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan administrasi Negara terhadap pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)?. Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) bagaimana prosedur pembatalan perkawinan?, 2) bagaimana penyebab terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar ?, dan 3) bagaimana pengadministrasian Negara setelah terjadi pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan?.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) kualitatif. Dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan normatif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan studi keperpustakaan dan studi lapangan. Teknik penulisan yang digunakan dalam studi lapangan adalah wawancara, dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data dalam penyajian data digunakan adalah identifikasi data, editing data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan diputuskan oleh Pengadilan Agama. Adapun prosedur pembatalan perkawinan yaitu pengajuan gugatan, penerimaan perkara, pemanggilan dan persidangan. Pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar disebabkan karena tanpa seizin istri pertama, izin dari Pengadilan. Semua yang menyangkut administrasi Negara batal dengan adanya pembatalan perkawinan. Suami dan istri yang sudah dibatalkan pernikahannya kembali statusnya terdahulu seperti saat mereka belum melakukan perkawinan. Adapun akibat hukum terhadap anak yaitu tidak berlaku surut dan anak tetap menjadi anak sah, untuk harta bersama selama perkawinan itu tidak ada hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, apabila yang beritikad baik dirugikan yang menanggung adalah pihak yang beritikad buruk. Dan akibat hukum terhadap hubungan suami istri setelah pemabatalan itu dianggap tidak pernah terjadi sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dan diharamkan bagi mereka yang perkawinannya telah dibatalkan untuk melakukan hubungan suami istri

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Hendaknya kepada para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan, sebaiknya terlebih dahulu mengecek keadaan sesungguhnya atau identitas dari seseorang yang akan dinikahi baik itu laki-laki dan perempuan; 2) Bagi mahasiswa, skripsi ini semoga dapat memberikan referensi baru bagi penelitian selanjutnya. Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Islam Allah swt menjadikannya manusia dengan fitrahnya yang ingin hidup berpasang-pasangan, berkasih sayang, bahagia dan dapat memenuhi tuntutan syahwatnya melalui cara yang halal. Oleh karena itu, bagi laki-laki yang sudah mapan dan cukup umur diwajibkan melangsungkan suatu perkawinan.

Allah swt berfirman dalam Q.S Ar Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Terjemahnya:

“Dan diantara tentang kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹

Ayat diatas mengindikasikan bahwa tujuan utama perkawinan yaitu untuk memperoleh kehidupan yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang serta diridhoi oleh Allah swt.

Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketentuan Allah swt

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2008), h. 406.

yang maha esa.² Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*misqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Perkawinan adalah termasuk perbuatan hukum, sah tidaknya suatu perbuatan hukum di tentukan oleh hukum dan norma agama yang ada dan berlaku saat ini. Perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan, rukun perkawinan merupakan hakekat yang memang mutlak harus ada dalam suatu perkawinan karena apabila satu saja rukun perkawinan yang tidak terpenuhi maka perkawinan tidak terlaksana. Begitu juga dengan syarat perkawinan haruslah dipenuhi karena apabila syarat tersebut tidak terpenuhi atau melanggar larangan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pencatatan perkawinan dan akta nikah merupakan sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam. Suatu pernikahan seharusnya memenuhi semua syarat sah suatu perkawinan, salah satunya yaitu Administratifnya. Namun terkadang suatu perkawinan akan dibatalkan jika administratifnya tidak lengkap.

Adapula perkawinan yang putus batal oleh hakim karena pihak yang bersangkutan tidak melengkapi syarat atau rukun sah dari suatu perkawinan, dengan kata lain yang bersangkutan tidak memenuhinya. Sehingga dengan tidak terlengkapinya persyaratan atau syarat sah perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

²Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dalam Niniek Supami, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h. 8.

³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam diIndonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

Dari beberapa penjelasan diatas, bahwa terjadinya pembatalan perkawinan terkait mengenai syarat, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Salah satu realita yang terjadi dimasyarakat dan menjadi objek penelitian penulis, yakni kasus yang diutuskan Pengadilan Agama Makassar. Kasus yang penyusun teliti bermula dengan adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh Suami (Tergugat I) dan seorang perempuan (Tergugat II). Perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa seizin istri pertama (penggugat) dan izin dari Pengadilan setempat juga adanya kekeliruan terhadap administrasi negara yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Tamalate yang mensahkan atau melakukan persetujuan pernikahan dan melakukan pencatatan dalam akta nikah Nomor 0728/65/IX/2016 hari sabtu tanggal 17 september 2016 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tertanggal 19 September 2016 terdapat tergugat I dan Tergugat II yang dimana, pada tergugat I ini sudah melakukan pernikahan sebelumnya dan belum resmi bercerai atau tanpa izin dari pengadilan, tapi pihak Kantor Urusan Agama tetap melakukan pencatatan pernikahan pada istri (Tergugat II).

Tugas pengadilan agama adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Dalam pemeriksaan suatu perkara dibutuhkan alat-alat bukti yang dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara serta dasar hukum yang diakui oleh Hakim di Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara juga harus sesuai dengan dengan perundang-undangan dan hukum Islam.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan suatu perkawinan sebelum akad terjadi, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan terhadap syarat dan rukun perkawinan, baik yang ditentukan oleh agama maupun undang-undang perkawinan. Kalau ternyata syarat dan rukun perkawinan tersebut belum lengkap atau diketahui ada penghalang perkawinan, maka pelaksanaan akad perkawinan wajib dicegah, bahkan apabila perkawinan tersebut sudah terlaksana dapat diajukan pembatalan.

Sehubung dengan hal tersebut, perkawinan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak istri pertama dan izin dari Pengadilan setempat, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal. Pembatalan perkawinan tentu saja dapat menimbulkan akibat hukum, baik terhadap hubungan antara suami istri yang dibatalkan perkawinannya, keturunannya serta harta bersama mereka.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah tentang bagaimana tinjauan administrasi Negara terhadap pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar).

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dideskripsikan substansi permasalahan dengan pendekatan ini. Bahwa dengan demikian, Administrasi negara, supaya dalam penelitian ini tidak keluar dari pembahasan yang akan dikajinya.

Untuk dapat memahami arti administrasi dalam arti luas, ada beberapa definisi-definisi yaitu, Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap

pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. (The Liang Gie, 1980). Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya. (Sondang P.Siagian, 1980). Administrasi (Lat. Administrase), meliputi segala proses pelaksanaan tindakan kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan (Ensiklopedia Indonesia, 1980).⁴

Dengan ini *Administrasi Negara* adalah penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan.⁵ Administrasi Negara dalam hal ini hanya pembagiannya saja yaitu Administrasi kependudukan, dimana didalamnya diatur tentang pencatatan perkawinan dan pembatalan perkawinan.

Pembatalan adalah pembatalan yang berasal dari kata Batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada.⁶

Perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis dengan melakukan akad yang sangat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan).⁸

⁴Ulbert Silalahi, *Studi tentang Ilmu Administrasi* (Bandung: Sinar Baru Angensido, 2009), h. 9

⁵Ulbert Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administarsi Negara*, h. 5.

⁶Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 234.

⁷Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 456.

Hukum adalah akibat yang timbul karena peristiwa hukum.⁹ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan dengan 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) Undang-Undang peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim (di Pengadilan) atau vonis.¹⁰

Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antar manusia didalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh sebab itu, setiap orang didalam masyarakat wajib taat dan mematuhi.¹¹

C. Rumusan Masalah

Dari pokok permasalahan, sub-sub masalah yang menjadi perhatian dalam penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar?
2. Bagaimana penyebab sehingga terjadi suatu Pembatalan Perkawinan terhadap pasangan suami istri yang dibatalkan pernikahannya di Pengadilan Agama Makassar ?

⁸Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.20.

⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.20.

¹⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 410.

¹¹Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Melton Putra, 2003), h. 1.

3. Bagaimana proses administrasi Negara setelah terjadi Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar ?

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan Administarsi Negara, pembatalan perkawinan dan akibat hukum. Buku-buku yang membahas permasalahan tersebut juga semakin banyak ditemukan.

Beberapa buku yang terkait dengan masalah Administrasi Negara, pembatalan perkawinan dan akibat hukum.

Karya R.Soetojo Prawirohami dan Asis Safioedin, “*Hukum Orang dan Keluarga*”, di dalam bukunya terdapat pemaparan tentang Pembatalan Perkawinan, pengertian dan ruang lingkupnya dan ketentuan tentang pembatalan perkawinan.

Karya H. Zainuddin Ali yang berjudul “*Hukum Perdata Islam*” dalam buku ini mengatakan suami dan istri dalam proses pembatalan perkawinannya di Pengadilan Agama, tidak melakukan hubungan pergaulan. Hal ini dimaksudkan supaya tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Garis hukum Islam yang diatur oleh pasal 76 KHI adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang akan dibatalkan oleh Pengadilan Agama, sehingga kekeliruan orang tua tidak dapat dilimpahkan kepada anak-anaknya. Meskipun secara psikologis, jika pembatalan perkawinan dimaksud benar-benar terjadi, akan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Akan tetapi, untuk tegaknya hukum dalam

masyarakat maka kebenaran harus diwujudkan dalam kenyataan walaupun dalam suasana kepahitan.¹²

Sri Turatmiyah, M.Syaifuddin dan Arfianna Novera dalam jurnal yang berjudul “*Pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*” menjelaskan bahwa perkawinan sudah dilangsungkan dan kemudian ada hal-hal yang diatur dalam undang-undang yang dapat mengakibatkan batalnya suatu perkawinan. Pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap anak, istri dan harta bersama yang telah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Sesuai ketentuan dalam pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pembatalan perkawinan diajukan di Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan yang dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri.¹³

H. Abdul Manan yang berjudul “*Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*” dalam buku ini mengatakan bahwa Dampak perkawinan yang tidak dicatat itu diantara lain suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara, anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari istri yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlakukan akta nikah dari orang tuanya, anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuannya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 40.

¹³S. Turatmiyah, M. Syaifuddin, A. Novera, *Pembatalan Perkawinan serta Akibat Hukumnya dalam Perspektif UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Simbur Cahaya XXIII, No. 56 (2015), h. 4269.

mereka sebagai ahli waris orang tuanya, atau hak-hak lain dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.¹⁴

Dr. Ahmad tholabi Kharlie yang berjudul “*Hukum Keluarga Indonesia*” dalam buku ini mengatakan bahwa di Indonesia, regulasi pencatatan perkawinan telah ditetapkan tidak lama setelah Indonesia merdeka, yakni diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 1 ayat ((1)). Dalam pasal 3 ayat (1) undang-undang ini disebutkan, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan akan dihukum denda sebanyak Rp50,-, meskipun dalam penjelasan undang-undang ini ditekankan bahwa pencatatan sebagai syarat administratif.¹⁵

Dengan demikian, setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan hasil penelitian yang serupa dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, artinya masalah ini sama sekali belum pernah diteliti sebelumnya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah diatas, maka peneliti mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui prosedur pembatalan perkawinan.
2. Untuk mengetahui apa penyebab sehingga terjadi suatu pembatalan perkawinan terhadap pasangan suami istri.

¹⁴Abdul Manan, M.Hum. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 51.

¹⁵Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 189.

3. Untuk mengetahui pengadministrasi Negara terhadap suami istri yang dibatalkan perkawinannya dan Akibat Hukum yang ditimbulkannya.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, untuk memperkaya keilmuan peneliti dalam bidang hukum yang berkaitan dengan Administrasi Negara terhadap pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya.
2. Kegunaan Praktis, dapat dijadikan pertimbangan untuk masyarakat dalam membatalkan perkawinan dan akibat hukum dan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pembatalan perkawinan dan cara penyelesaiannya.
3. Untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam rangka penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al-Quran dan Al Hadist. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “perkawinan menurut Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang melaksanakannya merupakan ibadah.”¹

Perkawinan dengan kata lain adalah pernikahan, menurut bahasa pernikahan adalah Al-jam’u dan Al-dhamu yang artinya kumpul.² Beberapa penulis juga terkadang menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³

¹Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999), h. 136.

²Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002), h. 7.

³Amonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456.

Adapun pengertian dari segi istilah, para ulama berbeda, namun perbedaan tersebut tidak mempengaruhi hakikat yang ingin dituju, karena pada umumnya hanya berbeda dari segi redaksi semata.

Menurut Mohammad Asmawi, nikah adalah melakukan aqad atau perjanjian antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan pergaulan sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama. Menurut Sabiq dalam Fikih Sunnah mengatakan perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha meridhai, dan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Riyadh Al-muhaisin, Kholid bin ibrohim Ash-Shoq'abi, dan Muhammad bin Sholih Al-'Utsaimin sepakat mengatakan, nikah adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk saling bersenang-senang satu sama lainnya dan untuk membentuk keluarga yang shalihah maupun masyarakat yang baik.

Dapat diperhatikan dalam definisi-definisi ini, bahwa semuanya mengarah pada titik diperbolehkannya terjadinya persetubuhan, atau dihalalkannya memperoleh kenikmatan dari seorang wanita dengan lafazh tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa nikah adalah ikatan perjanjian atau aqad yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya yang didalamnya terdapat lafazh *nikah* atau *tazwij* atau bahasa lain yang semkna dengannya.⁴

⁴Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Cet.I; Makassar: Alauddin Universty Press, 2014), h. 8-10.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan definisi perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, maka terdapat lima unsur didalamnya, yaitu:⁵

- a) Ikatan lahir batin. Maksudnya adalah bahwa dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi kedua-duanya harus berpadu erat. Ikatan lahir batin merupakan ikatan yang dapat dilihat dengan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain hal tersebut disebut hubungan formal, sesuatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan lahir batin dapat dijadikan dasar fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam hal ini perlu adanya usaha sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci sesuai yang diajarkan oleh agama yang dianut masing-masing pihak.
- b) Antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan wanita. Dengan demikian Undang-Undang ini tidak melegalkan hubungan perkawinan sesama jenis antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Selain itu juga bahwa unsur ini mengandung asas perkawinan monogami. Namun asas monogami dalam Undang-Undang

⁵Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Keluarga Perdata Barat* (Cet. 1; Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h. 44

Perkawinan bukan asas monogami mutlak seperti yang terdapat dalam KUHPerdara.

- c) Digunakan ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, persekutuan antara seorang pria dengan wanita dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Pertama, bahwa perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kedua, perkawinan dicatatkan menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- d) Dalam Pasal tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, artinya melarang adanya perkawinan yang sementara sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *Mut’ah*. Yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali seseorang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali cerai karena kematian.
- e) Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang sebelumnya yaitu KUHPerdara hanya memandang perkawinan dari segi hubungan keperdataannya

saja. Undang-Undang Perkawinan memandang perkawinan berdasarkan atas kerohanian. Sebagai Negara yang berdasarkan pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir batin tetapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan penting dalam suatu perkawinan.

Undang-Undang perkawinan menempatkan agama sebagai unsur yang sangat penting dalam perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi. Apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut adalah tidak sah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administrasinya, yaitu pencatatan di KUA dan Catatan Sipil.⁶

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan bersumber dari Al-Quran dan Hadist, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

⁶Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Yogyakarta: Maret 2001), h. 61.

Pasal 2 KHI.

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 KHI

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah”.

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP.“

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu’. Ayat (2) mengungkapkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”.⁷

Pasal 4 KHI

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Ungkapan “akad” yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir bathin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan KeTuhan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 8.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin dari seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam menaati perintah Allah dan merupakan suatu perbuatan ibadah. Berikut adalah suruhan Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakan perkawinan, firman Allah swt dalam Q.S An-Nur/24:32.⁸

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Dalam hadist Rasulullah SAW, di temukan beberapa anjuran untuk melangsungkan pernikahan diantaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

“Abdullah Ibnu Mas'ud *Radliyallaahu 'anhu* berkata: Rasulullah Saw. bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan

⁸Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Cet.I; Makassar: Alauddin Universty Press, 2014), h. 11.

memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”. Muttafaq Alaihi.”⁹

3. Hikmah dan Tujuan Perkawinan

Anjuran telah banyak disinggung oleh Allah dalam Al-quran dan Nabi lewat perkataan dan perbuatannya. Hikmah yang berserakan di balik anjuran tersebut bertebaran mewarnai perjalanan hidup manusia.

Secara sederhana, setidaknya ada 5 (lima) hikmah di balik perintah menikahi dalam Islam:

- a) Sebagai wadah birahi manusia
- b) Meneguhkan ahlak terpuji
- c) Membangun rumah tangga Islami
- d) Memotivasi semangat ibadah
- e) Melahirkan keturunan yang baik.

Adapun tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a) Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

⁹Al-Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Jakarta: Klang Book centre, 2007), h. 45.

b) Untuk Membentengi Akhlak Yang Luhur

Sasaran utama dari yang disyariatkannya perkaawinan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur.

c) Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Dalam Al-quran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah.

d) Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia.

e) Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih

Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani adam.¹⁰

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tututan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang di syariatkan.

Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqh sunnah memaparkan 3 tujuan:

- a) Melindungi jiwa dari kekacauan jiwa
- b) Melestarikan hidup manusia

¹⁰Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Cet.I, Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 35.

c) Mengabdikan kepada Allah (aspek ibadah).¹¹

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi. Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹² Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Adapun rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam Islam antara lain:

Akad nikah tidak akan sah kecuali jika terpenuhi rukun-rukun yang enam perkara ini:

1) Ijab Qabul

Islam menjadikan Ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria) dan Qabul (pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak.

Syarat ijab-qabul adalah:

- a) Diucapkan dengan bahasa yang dimengerti oleh semua pihak yang hadir.
- b) Menyebut jelas pernikahan dan nama mempelai pria-wanita.

2) Adanya mempelai pria

Syarat mempelai pria adalah:

¹¹Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 23.

¹²Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 tahun, 1974, Pasal 2.

- a) Muslim dan mukallaf (sehat akal-baliq-merdeka); Bukan mahram calon istri.
- b) Tidak dipaksa.
- c) Orangnya jelas.
- d) Tidak sedang melaksanakan haji.

3) Adanya mempelai wanita

Syarat mempelai wanita adalah:

- a) Muslimah (atau beragama samawi, tetapi bukan kafirah/musyrikah) dan mukallaf.
- b) Tidak ada halangan syar'i (tidak bersuami, tidak dalam masa 'iddah dan bukan mahram dari calon suami).
- c) Tidak dipaksa.
- d) Orangnya jelas.
- e) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.

4) Adanya wali

Syarat wali adalah:

- a) Muslim laki-laki dan mukallaf (sehat akal-baliq-merdeka).
- b) 'adil
- c) Tidak dipaksa
- d) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.

5) Adanya saksi (2 orang pria)

Meskipun semua yang hadir menyaksikan akad nikah pada hakikatnya adalah saksi, tetapi Islam mengajarkan tetap harus adanya 2 orang saksi pria yang jujur lagi adil agar pernikahan tersebut menjadi sah.

Syarat saksi adalah:

- a) Muslim laki-laki dan mukallaf (sehat akal – baliq- merdeka).
- b) ‘adil.
- c) Dapat mendengar dan melihat.
- d) Tidak dipaksa.
- e) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab-qabul,
- f) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.

Adapun syarat nikah adalah sebagai berikut:

- a) Kepastian siapa mempelai laki-laki dan siapa mempelai wanita dengan isyarat (menunjuk) atau menyebutkan nama atau sifatnya yang khusus/khas. Sehingga tidak cukup bila seorang wali hanya mengatakan “aku nikahkan engkau dengan putriku”, sementara ia memiliki beberapa orang putri.
- b) Keridhoan dari masing-masing pihak, dengan dalil hadis Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* secara marfu’. Terkecuali bila si wanita masih kecil, belum baligh, maka boleh walinya menikahkannya tanpa seizinnya.
- c) Adanya wali bagi calon mempelai wanita.¹³

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan.

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat

¹³Sabri Samin, Andi Narmaya Aroeng, *FIKIH II* (Makassar : Alauddin Press, 2010), h. 19-23.

tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.¹⁴

5. Asas-Asas Perkawinan

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas antara lain adalah sebagai berikut:

1) Asas kesukarelaan

Asas kesukarelaan adalah asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami istri saja. Tetap juga antara kedua orang tua kedua belah pihak tersebut. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita adalah merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadis nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

2) Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas ini merupakan asas konsekuensi logis asas pertama yang disebutkan tadi, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, mislanya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai sunnah nabi dapat diketahui bahwa perkawinan dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 61.

3) Asas Kebebasan memilih

Asas ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis yang bernama Jariyah menghadap Rasulullah SAW dengan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduannya itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya itu dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang yang disukainya.

4) Asas Kemitraan Suami Istri

Asas ini dengan tugas dan fungsinya yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Alquran Suran An-Nisa (4) ayat 34 dan Surah Al-Baqarah Ayat 187. Kemitraan menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama namun dalam hal yang lain berbeda, misalnya: suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

5) Asas Untuk Selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Alquran surah Al-Rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yaitu perkawinan sementara yang diperuntukkan hanya bersenang-senang selama waktu tertentu saja seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu, hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

6) Asas Monogami Terbuka (Karena Darurat)

Asas ini disimpulkan dari Alquran surah An-Nisa Ayat 3 jo Ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan beristri lebih dari seorang asal dapat memenuhi beberapa syarat tertentu diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surah yang sama Allah Swt menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun dia ingin berbuat demikian.

Oleh karena ketidak mungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah Swt menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik hanya menikahi seorang wanita saja. Ini berarti istri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya atau sesuatu yang menyebabkan ia bertindak demikian, misalnya untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa atau apabila istrinya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, dan lain-lain.¹⁵

6. Perjanjian Kawin

Ketentuan tentang Perjanjian perkawinan terdapat Pasal 29 UU No. 1974 dan Pasal 139-154 KUHPerdara. Masih berlakunya Pasal-Pasal dalam KUHPerdara tersebut karena Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1979 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perjanjian kawin-untuk itu melalui Petunjuk Mahkamah Agung RI No: MA/0807/75 membolehkan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara.

¹⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2006), h. 139.

Adapun pengertian Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.

Perjanjian perkawinan dapat dilakukan apabila pengaturan harta benda tidak sesuai dengan keinginan calon suami isteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1975, yaitu:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi bercampur
- 2) Harta bawaan, hadiah atau warisan menjadi harta masing-masing selama tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dengan demikian apabila calon suami istri ingin menyimpang diri ketentuan tersebut diatas, maka perjanjian perkawinan dapat dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 29 UU NO. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama, dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah nama isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d) Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan ini tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan diatas, perjanjian bisa dibuat asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan serta harus dibuat tertulis (akta notaris) dengan tujuan:

- a) Keabsahan perjanjian kawin tentang harta benda;
- b) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perkawinan itu seumur hidup;
- c) Demi kepastian hukum;
- d) Sebagai alat bukti yang sah;
- e) Mencegah adanya penyelundupan hukum.

Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan alasan: 1) Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain; 2) Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (penghasilan) yang cukup besar; 3) Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh bangkut (pailit), yang lain tidak tersangkut; 4) Masing-masing bertanggungjawab atas utang-utang yang mereka buat sebelum kawin.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah paembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22-28 UU No. 1 tahun 1974), ini berarti bahwa

¹⁶Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia* (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 100-102.

perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatal.

Menurut Soedaryo Soimin, S.H:

“Pembatalan Perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang.”

“Pembatalan Perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.”¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Jadi, pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Pasal 22 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan.¹⁸

Adapun arti dari pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada. Ketika suatu perkawinan dinyatakan oleh pengadilan itu dibatalkan maka penggugat berhak menerima akta pembatalan perkawinan tersebut dan membawa akta pembatalan perkawinan tersebut ditempat perkawinan didaftarkan agar akta perkawinan dan pendaftaran perkawinan yang telah dilakukan tersebut dihapuskan.

¹⁷ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupanoto, *Hukum Islam II* (Surakarta: Fakultas Hukum, 1986), h.2.

¹⁸ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> (Diakses 22 Mei 2017).

Dari pengertian pembatalan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa: Perkawinan dianggap tidak sah; juga dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.¹⁹

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Dengan ini bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan perkawinan suami istri dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Pembatalan perkawinan menurut hukum Islam disebut *Fasakh* yang berarti merusak atau membatalkan. Jadi *Fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Namun untuk sekedar memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan perkawinan tersebut, maka pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.

Fasakh disebabkan oleh dua hal:

- 1) Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.

¹⁹Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975), h. 71.

- 2) Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.²⁰

Bila ketidak absahannya suatu akad nikah itu terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu diantara rukun-rukunya, maka akad nikah tersebut adalah batal. Sedangkan bilamana dalam akad nikah tersebut salah satu saja diantaranya syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka akad nikah itu adalah fasakh.

Ada juga hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya fasakh, yaitu :

- 1) Karena ada balak (penyakit belang kulit). Dalam kaitan ini ada sebuah hadits yaitu:

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُرْنِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: صَحِبْتُ شَيْخًا مِنَ الْأَنْصَارِ، ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ: كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ، وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ، أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَأَنَحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ، ثُمَّ قَالَ: «خُذِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ»، وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا أَتَاهَا شَيْئًا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Qasim bin Malik Al Muzani, Abu Ja'far berkata; telah mengabarkan kepadaku Jamil bin Zaid berkata; saya menemani seorang guru dari Anshar, yang disebutkan bahwa dia adalah salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab, dia menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menikahi seorang perempuan Bani Ghiffar, ketika beliau menemuinya dan meletakkan bajunya serta duduk di atas tempat tidur, beliau melihat bagian badan perempuan tersebut di sekitar pinggul berwarna putih, maka beliau bangkit dari tempat tidur dan berkata; "Ambillah bajumu" dan beliau tidak mengambil apapun dari yang telah beliau berikan kepadanya".²¹

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 253.

²¹ Ahmad ibn Hambal Abu 'Abdullah Al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal*, Juz. XXV (Beirut: Muassasah Risalah, 1995 M/1416 H), h. 417.

- 2) Karena gila
- 3) Karena penyakit kusta
- 4) Karena adanya penyakit menular, seperti sipilis, TBC dan sebagainya.

Dijelaskan dalam suatu riwayat:

“Dari Sa’id bin Musayyab radiallahu’anh ia berkata: barang siapa diantara laki-laki yang menikah dengan seseorang perempuan, dan pada laki-laki itu terdapat tanda-tanda gila, tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika mau ia tetap dalam perkawinannya dan jika berkehendak cerai maka perempuan itu boleh bercerai.” (HR.Malik)

- 5) Karena adanya daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).
- 6) Karena ‘*unnah*, yaitu zakar laki-laki impoten sehingga tidak mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.²²

Dalam hukum Islam dikenal berbagai larangan perkawinan (nikah) yang tidak boleh dilanggar, antara lain:

- 1) Adanya hubungan keluarga yang dekat;
- 2) Derajat calon suami adalah lebih rendah dari calon istri;
- 3) Seorang wanita menikah lagi dalam masa tunggu;
- 4) Seorang wanita yang masih dala keadaan kawin, kawin lagi dengan pria lain;
- 5) Seorang suami yang beristrikan empat orang kawin lagi dengan istri yang kelima.

Apabila larangan tersebut dilanggar, maka perkawinannya dapat menjadi batal atau dapat dibatalan (difasidkan).²³

²²Ardychandra, *Putusnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam*, <http://.wordpress.com> (8 Juni 2017).

²³Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 123.

3. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 hingga Pasal 76. Pasal 70 menegaskan bahwa perkawinan batal apabila:

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat istri sekalian salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'I;
- 2) Seseorang telah menikahi istrinya yang telah dili'anya;
- 3) Seseorang yang telah menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhkan tiga kali talak olehnya, kecuali jika bekas istri tersebut telah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- 4) Perkawinan yang dilakukan diantara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu, antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan neneknya;
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
 - d) Berhubungan sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71 suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagai mana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974;
- 5) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- b) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami istri;
- c) Apabila ancaman sudah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.²⁴

²⁴Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Nuansa Aulia, 2012), h. 21-23.

Pasal 28 ayat (1) UU dijelaskan dengan rumusan yang hampir sama oleh KHI dalam Pasal 74 ayat (2):

“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Pasal 28 ayat (2) dijeaskan KHI dalam Pasal 75 dan Pasal 76:

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76

“Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.

4. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

UU perkawinan yang mengatur batalnya perkawinan dalam 7 Pasal dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 22

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
- 2) Suami atau istri.
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU ini”.

Pasal 25

“Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri, suami atau istri”.

Pasal 26

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya gugur.

Pasal 28

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a) Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b) Suami atau istri yang bertidak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana bagi UU No. 1 Tahun 1974 hanya sedikit yang mengatur pembatalan perkawinan itu dengan rumusan:

Pasal 37

“Batalnya suatu perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan”.

Pasal 38

- 1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.
- 2) Tata cara permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- 3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.²⁵

Pencatatan pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 39 yang berbunyi:

- 1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat keterangan Pembatalan Perkawinan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.²⁶

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 254-256.

5. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

1) Adanya Perkawinan Rangkap (dubble huwelijk)

Bilamana perkawinan terlebih dahulu itu dibubarkan karena karena suatu sebab, maka haruslah diputuskan terlebih dahulu. Karena sebelum adanya putusan tentang pembatalan perkawinan pertama, dan sudah dilakukan lagi perkawinan kedua, maka perkawinan yang terakhir ini (Perkawinan Rangkap) dapat dinyatakan batal. Pembatalan adanya perkawinan rangkap dapat diminta oleh:

- a) Orang tua;
- b) Semua anggota keluarga sedarah dalam garis lurus keatas;
- c) Saudara-saudaranya;
- d) Curator-nya; dan
- e) Jaksa.

2) Tiadanya kata sepakat pihak-pihak atau salah satu pihak

Menurut ketentuan Pasal 28 KUHPdata bahwa kebebasan memberikan kesepakatan (Urije Toestemming) merupakan hakikat dari pada perkawinan. Bilamana hal ini tidak ada, misalnya karena salah satu pihak dalam keadaan gila, mabuk, adanya paksaan atau karena adanya kekhilafan (dwaling) maka menurut ketentuan Pasal 87 KUHPdata keabsahan dari perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Dalam hal ini yang berhak menuntut kebatalan adalah suami istri atau salah satu dari mereka yang tidak memberikan kata sepakatnya secara bebas.

²⁶Siti Zubaedah dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: T.p. 2004), h. 132.

3) Tidak adanya kecakapan untuk memberikan kesepakatan

Pembentukan undang-undang menganggap bahwa setiap orang yang cacat akal budinya selalu diletakkan dibawah pengampunan. Perkawinan seseorang yang gila tetapi tidak diletakkan dibawah pengampunan dapat dinyatakan batal berdasarkan Pasal 87 KUHPerdara. Oleh karena itu, orang yang gila tidak mungkin memberikan kesepakatannya secara bebas (Urije Toestomming). Pembatalan perkawinannya dapat dimintakan oleh:

- a) Orang tua;
 - b) Semua anggota keluarga sedarah dalam garis lurus keatas;
 - c) Saudara-saudaranya;
 - d) Curator-nya; dan
 - e) Jaksa.
- 4) Belum mencapai usia untuk kawin

Batas usia kawin antara KUHPerdara dan Undang-Undang perkawinan berbeda, menurut KUHPerdara batas usia kawin bagi pria adalah 18 tahun dan wanita 15 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan pria 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun.

Dalam hal ini yang berhak menuntut pembatalan perkawinan adalah suami istri yang belum usia kawin dan kejaksan. Gugatan tidak dapat diajukan lagi, bilamana:

- a) Bilamana pada hari pengajuan gugatan usia yang disyaratkan telah terpenuhi; dan

- b) Bilamana wanita yang bersangkutan, meskipun usinya masih muda sebelum hari diajukan ggatan, dala keadaan hamil (Pasal 89 KUHPperdata).

5) Keluarga sedarah dan semenda

Perkawinan dilarang bagi mereka yang memiliki hubungan darah. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dilarang bagi mereka karena:

- a) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan kebawah keatas;
- b) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping; dan
- c) Adanya hubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.

Sedangkan dalam KUHPperdata hal ini diatur dalam Pasal 90 jus 30 dan 31. Adapun yang berhak menuntut pembatalan perkawinan adalah suami istri itu sendiri, orang tua mereka, sanak keluarga dalam garis lurus keatas, mereka yang mempunyai kepentingan dan kejaksaan.

6) Perkawinan anantara mereka yang melakukan overspel

Overspel adalah persetubuhan yang dillakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah atau belum tetapi tidak diikat oleh perkawinan yang dilakukan suka sama suka, tanpa adanya paksaan.

7) Perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama

KUHPperdata pada dasarnya melarang seseorang yang melakukan perkawinan ketiga pada orang yang sama atau setelah perceraian atau telah bubar setelah adanya pisah meja dan tempat tidur sebelum jangka waktu 1 tahun terlampaui. Menurut

ketentuan Pasal 33 KUHPdata perkawinan antara orang yang sama setelah kedua kalinya adalah terlarang.

Dalam hal ini yang berhak menuntut pembatalan perkawinan adalah :

- a) Suami istri itu sendiri;
 - b) Orang tua;
 - c) Sanak keluarga dalam garis lurus keatas;
 - d) Pihak yang mempunyai kepentingan; dan
 - e) Jaksa.
- 8) Tidak adanya izin yang disyaratkan

Berdasarkan Pasal 35,36,452 Ayat 2 KUHPdata pihak ketiga yang berhak memberi izin perkawinan adalah orang tua sekandung, kakek dan nenek, atau wali. Jika suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin bapak sekandung, ibu sekandung, kakek sekandung, wali atau wali pengawas, maka dalam hal izin harus diperoleh ataupun wali harus didengar menurut Pasal-Pasal 36,37,38,39 dan 40, pembatalan perkawinan hanya boleh dituntut oleh orang yang diperoleh izinnya dalam suatu perkawinan atau harus didengar menurut Undang-Undang.

Pasal 91 KUHPdata yaitu: "Para pihak sedarah yang izinya disyaratkan tidak lagi boleh menuntut pembatalan perkawinan, apabila secara diam-diam, atau perkawinan itu telah berlangsung 6 (enam) bulan tanpa bantahan apapun dan mereka terhitung sejak saat mereka mengetahui perkawinan itu."

Pembatalan perkawinan semacam ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berhak memberikn izin dalam suatu perkawinan. Adapun batalnya suatu perkawinan

tidak dapat dituntut lagi, apabila pihak yang berhak memberikan izin kawin dengan tegas atau dengan diam-diam telah menyetujui perkawinan tersebut.

9) Ketidakwenangan pejabat catatan sipil

Perkawinan dapat dapat dibatalkan apabila pejabat catatan sipil tidak berwenang, jumlah saksi tidak cukup atau saksinya tidak memenuhi persyaratan. Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan Pegawai Catatan Sipil yang berwenang dan tanpa kehadiran sejumlah saksi yang sebagaimana disyaratkan, dapat dimintakan pembatalannya oleh suami istri itu, oleh bapak, ibu dan keluarga sedarah lainnya dalam garis lurus keatas, dan juga oleh wali, wali pengawas dan oleh siapapun berkepentingan dalam hal itu, dan akhirnya oleh kejaksaan.

Jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 76, sejauh mengenai keadaan saksi-saksi, maka perkawinan itu tidak mutlak harus batal; hakimlah yang akan mengambil keputusan menurut keadaan. Pasal 92 KUHPdata yaitu “bila tamak jelas adanya hubungan selaku suami istri dan dapat pula diperlihatkan akta perkawinan yang dibuat dihadapan Pegawai Catatan Sipil, maka suami istri itu tidak dapat diterima untuk minta pembatalan perkawinan mereka.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan tuntutan pembatalan perkawinan adalah:

- a) Suami istri itu sendiri;
- b) Orang tua;
- c) Sanak keluarga dalam garis lurus keatas;
- d) Wali pengawas;
- e) Pihak yang mempunyai kepentingan; dan

f) Jaksa.

Tetapi pelanggaran mengenai saksi-saksi yang tidak memenuhi persyaratan, tidak secara mutlak mengakibatkan pembatalan perkawinan. Pernyataan batal atau tidaknya suatu perkawinan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (Pasal 76 KUHPerdara).

10) Perkawinan yang dilangsungkan walaupun ada pencegahan

Apabila perkara mengenai pencegahan perkawinan telah diajukan, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan. Jika tuntutan untuk mencegah perkawinan tersebut dikabulkan, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal. Sebaliknya, jika perkara pencegahan belum diajukan, maka orang yang berhak mencegah perkawinan harus mengajukan gugatannya. Hanya dengan alasan-alasan tersebut, maka perkawinan dapat dinyatakan batal oleh hakim.²⁷

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan yang meliputi wilayah tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

²⁷Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 124.

C. Tinjauan Umum tentang Administrasi Negara

1. Pengertian Administrasi

Secara etimologis administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan memberi bantuan dalam mengelolah informasi, mengelolah manusia, mengelolah harta benda kedalam suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi atau dapat diartikan sebagai pengolahan informasi atau kegiatan tata usaha.

Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta mempermudah memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.²⁸

2. Syarat-syarat pencatatan perkawinan

Adapun yang termasuk dalam syarat-syarat pencatatan perkawinan dalam ruang lingkup administrasi Negara diantaranya yaitu KTP (Kartu tanda penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dan lain-lain:

KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki warga Negara Indonesia (WNI) dan warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tetap tinggal (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah kawin atau telah kawin.²⁹

²⁸Ulbert Silalahi, *Studi tentang Ilmu Administrasi*, h. 4-5.

²⁹http://id.m.wikipedia.org/wiki/kartu_Tanda_Penduduk. (8 Juni 2017)

Prosedur penerbitan KTP Elektronik diantaranya.

- 1) Petugas operator melakukan verifikasi data penduduk dan perekam pas foto, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk ditempat pelayanan KTP Elektronik. Kemudian data dikirim secara online ke data center.
- 2) Data yang dikirim dan tempat pelayanan KTP Elektronik melalui pemancar diterima dan disimpan dalam data Base Afis.
- 3) Selanjtnya, dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang melalui mental.
- 4) Berdasarkan data tunggal dilakukan persolisasi (Pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukkan biodata pas foto, sidik jari dan tanda tangan) di kabupaten.
- 5) KTP Elektronik yang sudah dipersonilisasi disampaikan di kecamatan.
- 6) Desa
- 7) Penduduk wajib KTP
- 8) Vertifikasi dan aktivasi di kecamatan masing-masing

Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identifikasi anggota keluarga.

Syarat Penerbitan KK baru yaitu: 1) Izin tinggal tetap bagi orang asing; 2) foto copy atau memajukan kutipan akta nikah; 3) surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah; 4) surat keterangan datang dari luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri (SKPLN); 5) Ijasah terakhir.³⁰

³⁰http://id.m.wikipedia.org/wiki/kartu_keluarga . (8 Juni 2017)

3. Proses pelayanan pencatatan nikah adalah sebagai berikut:

1) Ke kantor desa/kelurahan

Untuk mendapatkan :

- a) Surat keterangan untuk nikah (model N1)
- b) Surat keterangan asal usul (model N2)
- c) Surat keterangan orang tua (model N4)
- d) Surat keterangan ke puskesmas untuk imunisasi TT

2) Ke Puskesmas

Untuk:

- a) Imunisasi TT I bagi calon pengantin wanita
- b) Imunisasi TT II dapat diperoleh dimana saja dengan menunjukkan kartu/bukti imunisasi TT I

3) Ke Kantor Urusan Agama (KUA)

Untuk:

- a) Memberitahukan akad nikah
- b) Pemeriksaan nikah
- c) Membayar biaya pencatatan nikah
- d) Pengumuman hendak nikah
- e) Mengikuti penataran calon pengantin dan penasehat oleh BP-4 dalam masa 10 hari sebelum akad nikah
- f) Pencatatan nikah

4) Pelaksanaan Akad Nikah

- a) Upacara akad nikah dilaksanakan di Balai Nikah (KUA) kecamatan
- b) Atas permintaan yang bersangkutan upacara akad nikah dilakukan diluar Balai Nikah
- c) Memperoleh Kutipan Akta Nikah (model NA).³¹

Untuk mendapatkan pelayanan pencatatan perkawinan, harus melengkapi persyaratan berikut ini:

- 1) Surat Bukti Perkawinan Menurut Agama
- 2) Akta Kelahiran
- 3) Surat keterangan dari lurah
- 4) Fotocopy KK/KTP yang dilegalisir oleh LURAH
- 5) Pas Foto berdamping ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar
- 6) 2 (dua) orang SAKSI yang telah berusia 21 tahun keatas
- 7) Akta kelahiran Anak yang akan akui/disahkan
- 8) Akta perceraian/Akta Kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin
- 9) Izin dari komandan bagi Anggota TNI / Kepolisian
- 10) Passport bagi WNA
- 11) Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian
- 12) Surat dari Kedutaan/ Konsul / Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan (bagi WNA)
- 13) SKK dari Imigrasi (bagi WNA).³²

³¹Diambil dari data KUA Tamalate (Bagan Proses Nikah). 15 Mei 2017.

³²Diambil dari data KUA Tamalate (Syarat-Syarat Pencatatan Perkawinan), 15 Mei 2017.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹ Penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan bahasa penelitian yang diperoleh dari informan lapangan sebagai wacana untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang ada dengan menghubungkan variabel-variabel dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dalam hal ini Kantor Pengadilan Agama Makassar, pilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut menyimpan dokumen yang diperlukan oleh penulis.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dimana jenis penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis dan pendekatan Normatif untuk mendapatkan suatu data yang sesuai dengan pokok permasalahan.

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), h. 21.

1. PendekatanYuridis

Pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang memiliki kolerasi dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif bersumber dari undang-undang yang menjelaskan tentang pembatalan perkawinan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan jenis data yang mengkategorikan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi keperpustakaan yaitu menelaah literature, jurnal, artikel, liputan, karya tulis ilmiah serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan objek yang diteliti. Sasaran wawancara adalah informan kunci yaitu hakim dan panitera, orang yang sangat berpengetahuan dan bias menyampaikan gagasan, orang yang pandangannya dapat menambah atau berguna dalam memahami apa yang sedang terjadi dalam hal ini bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan arsip-arsip yang berhubungan dngan data-data yang diperlukan, dalam hal ini data yang diperoleh dari arsip-arsip tersebut dipergunakan dalam gambaran umum tentang keadaan wilayah. Dokumen tertulis merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif.²

Dokumentasi berarti mengadakan komunikasi langsung sehingga memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendaramata, foto dan lain sebagainya. Secara detail bahan dokumenter terbagi bergai macam yaitu otobiografi,

²Sutopo, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), h.54.

surat-surat pribadi, buku catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data diservers dan flasdisk, data yang tersimpan di website dan lain-lain.³

E. Instrument penelitian

Instrument pengumpulan data adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Pada prinsipnya meneliti yaitu melakukan pengukuan dan pengamatan, maka harus ada alat ukur yang baik. Eksistensi intrumen dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsur penting karena berfungsi sebagai alat bantu atau sarana dalam mengumpulkan data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Pedoman wawancara yaitu alat yang digunakan dalam wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan.
2. Alat tulis dan buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua hal-hal yang penting dan menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis.
3. Kamera, berfungsi sebagai alat dokumentasi pada saat penulisan melakukan sesi wawancara dengan informan baik itu hakim maupun panitera yang mempunyai kepentingan dalam penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Pengolahan Data

³Suwardi Endarsawara, *Penelitian Kebudayaan: Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 116.

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu membangdinkan data primer dan data sekunder lalu diklarifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu pengetahuan.

Adapun langkah-langkah dalam mengolah data adalah sebagai berikut: pertama adalah identifikasi data yaitu melakukan proses klarifikasi terhadap data yang langsung diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data yang diperoleh dari data kepustakaan berupa data sekunder. Setelah semua data yang sudah terkumpul masih berupa bahan mentah, maka pengolahan data selanjutnya dilakukan dengan metode editing, yaitu memeriksa dan menempatkan data tersebut kedalam kerangka pembahasan dan telah persiapan berdasarkan rumusan masalah agar dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya verifikasi data yakni meneliti keabsahan data.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihanya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

G. Pengujian Keabsahan Data

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat

melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan meningkatkan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.⁴

2. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.⁵

⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfa Beta, 2009), h. 306.

⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 307.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Makassar menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada Pengadilan di wilayah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, ditempat kedua suami-istri, di tempat tinggal istri atau ditempat tinggal suami. Batalnya suatu perkawinan dimulai atau terjadi setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang sudah dibatalkan perkawinannya.¹

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan dan putusya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.

Prosedur yang dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu antara lain:

1. Pengajuan Gugatan

Yang Surat termohon pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama setempat. Surat pemohon yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang terdiri dari: Fotocopy tanda penduduk, Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa Pemohon benar-benar penduduk setempat, Surat keterangan tentang

¹Wawancara dengan Ibu Nadira, Hakim Pengadilan Agama Makassar , pada tanggal 22 Maret 2017.

hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon dan Kutipan akta nikah.

Yang melakukan pengajuan gugatan dalam perkara pembatalan perkawinan ini adalah Istri pertama yang tidak setuju atau tidak rela jika suami (Tergugat I) melakukan poligami. Dari Pos Bakum dibuatkan gugatan, apabila syarat-syarat di Pos Bakum telah lengkap dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan, setelah itu baru berkasnya dibawa ke meja I untuk mentaksir biaya perkara.

2. Penerimaan perkara

Surat pemohon harus didaftar terlebih dahulu oleh panitera, SKUM atau Surat Kuasa untuk Membayar uang didalamnya telah ditentukan berapa jumlah uang muka yang harus dibayar, lalu pemohon membayar dibank dalam bentuk slip penyetoran. Surat permohonan yang telah dilampiri kuitansi dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut diproses dan dilakukan pencatatan dan diberi nomor perkara setelah membawa kembali slip pembayaran/kuitansi asli kepengadilan. Kemudian Pemohon tinggal menunggu panggilan sidang.

3. Pemanggilan

Melakukan penetapan majelis hakim (tenggang waktu 1 minggu) kemudian penunjukkan hakim. Ketua Majelis menetapkan hari sidang, namun sebelumnya panitera pengganti menunjuk juru sita untuk mengambil sidang. Penunjukan juru sita tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

Panggilan sidang secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak djumpai disampaikan melalui lurah/Kepala Desa yang bersangkutan. Panggilan selambat-lambatnya sudah diterima oleh pemohon tiga satu hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan tenggang waktu antara pemanggilan

dan diterimanya pemanggilan tersebut perlu diperhatikan. Pemanggilan tersebut harus dilampiri salinan surat permohonan.

4. Persidangan

Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat permohonan tersebut. Pengadilan Agama akan memutuskan untuk mengadakan sidang jika terdapat alasan-alasan seperti yang tercantum dalam dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 27. Setelah dilakukan sidang, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada Pegawai Pencatat untuk mengadakan pencatatan pembatalan perkawinan.²

Selain itu pengajuan pembatalan perkawinan memiliki batas waktu. Untuk perkawinan anda sendiri (misalnya karena suami anda memalsukan identitasnya atau karena perkawinan anda terjadi karena adanya ancaman atau paksaan), pengajuan itu dibatasi hanya dalam kurun waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Apabila sampai lebih dari enam bulan anda masih hidup bersama sebagai suami isteri, maka hak anda untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur (Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974).

Sementara itu, tidak ada pembatalan waktu untuk pembatalan perkawinan suami anda yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan anda. Kapanpun anda dapat mengajukan pembatalannya. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

²Syafar, *Wawancara Staf Pengadilan Agama Makassar* (12 Mei 2017).

B. Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan terhadap Pasangan Suami Isteri

Adanya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh isteri pertama sebagai isteri sah terkait perkawinan suaminya yang dilakukan tanpa seizinnya dan izin dari Pengadilan setempat, sudah pasti menimbulkan akibat hukum pada para pihak. Hal tersebut akan berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembatalan perkawinan.

Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Makassar Nomor 2336/Pdt.G/2016/PA.MKS yang dilakukan oleh penggugat adalah tepat, dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perkawinan dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0728/65/IX/2016 hari Sabtu tanggal 17 September 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tertanggal 19 September 2016. Dimana Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perkawinan tanpa persetujuan Penggugat sebagai isteri sah dan tanpa izin dari Pengadilan setempat. Sehingga perkawinan tersebut melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (*Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*), sehingga perkawinan tersebut patut dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Ketua pengadilan Agama Makassar mengabulkan Permohonan Penggugat.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan amar putusan, yaitu: mengabulkan permohonan penggugat; membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Akta Nikah Nomor: 0728/6/IX/2016 hari sabtu 17 September 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tertanggal 19 September 2016. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum dan membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin isteri seperti dalam kasus tersebut yang dilakukan oleh Tergugat 1 dengan Tergugat II tanpa seizin isteri pertama dan izin dari Pengadilan. Perkawinan poligami ini harus dilakukan menurut ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut dapat menjadi sebuah perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun menurut hukum negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Secara umum, pembatalan perkawinan dilakukan karena syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum oleh para pihak. Dalam ajaran Islam, perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu perjanjian biasa, melainkan merupakan suatu perjanjian suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah swt.³

C. Pengadministrasian setelah terjadi pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan karena pembatalan perkawinan

Suatu pembatalan perkawinan pastilah menimbulkan pengaruh, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif, juga akan menimbulkan akibat hukum, baik akibat

³Abdul Rohim, *Kedudukan Hukum Perjanjian Sebagai Alasan Perjajian Masalah Masalah Hukum* (Jilid 4; Semarang:F.H. Universitas Dipenogoro, 2012), h. 62.

hukum pada tegugat, penggugat, maupun orang-orang atau keluarga di sekitar penggugat dan tergugat.

1. Pengadministrasian setelah terjadi pembatalan perkawinan

Setelah melakukan wawancara bahwa setelah putusan pembatalan perkawinan dikeluarkan oleh hakim, putusan tersebut diteruskan ke Kantor Urusan Agama oleh Kantor Pos, sedangkan buku nikah disimpan di Pengadilan yang memproses pembatalan perkawinan tersebut sebagai arsip negara/data autentik. Setelah itu masing-masing pihak mengurus administrasinya.⁴

Ada beberapa proses pengadministrasian yang harus dilakukan setelah melakukan pembatalan perkawinan yaitu masing-masing pihak dianjurkan untuk mengurus administrasinya, baik itu administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) identitas yang memuat data seseorang merupakan data Negara yang tidak boleh dirubah siapapun, kecuali melalui proses yang resmi. Sehingga bila terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan prosedur yang resmi maka harus dikembalikan sesuai dengan data awal termasuk kartu identitas lain seperti kartu keluarga (KK) dan lain-lainnya. Suami dan istri yang sudah dibatalkan pernikahannya tersebut kembali pada statusnya terdahulu, seperti pada saat mereka belum melakukan perkawinan tersebut.

Terhadap Administrasi Negara, Menurut Hakim Pengadilan Agama Makassar “Apabila suatu perkawinan sudah dibatalkan segala sesuatu yang menyangkut tentang administrasi itu batal dengan adanya pembatalan perkawinan”.

⁴Wawancara dengan Ibu Nadira, Hakim Pengadilan Agama Makassar , pada tanggal 22 Maret 2017.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan

Setelah melakukan pembatalan perkawinan, akan timbul beberapa akibat hukum, diantaranya:

a) Akibat hukum terhadap anak

Hakim Pengadilan Agama Makassar “Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah satu orang tuanya beritikad baik atau beritikad buruk”.⁵

Pembatalan dari kata batal, menganggap tidak sah atau tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Akibat pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2a) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa :”Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 75 dan 76 KHI. Anak-anak tetap menjadi anak yang “sah” sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh Pengadilan. Hal tersebut terjadi karena perkawinan merupakan persoalan yang harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan. Secara keperdataan perkawinan akan memberikan jaminan perlindungan

⁵Wawancara dengan Ibu Nadira, Hakim Pengadilan Agama Makassar , pada tanggal 22 Maret 2017.

hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkawinan, baik suami, isteri, anak maupun pihak ketiga. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum maka mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan, hakim dalam prakteknya tidak hanya sebagai mulut (corong) undang-undang atau peraturan tertulis. Dalam kenyataannya undang-undang tidak pernah lengkap atau kadang-kadang tidak jelas yang dapat menghambat hakim memutus perkara.

Mengingat ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Oleh sebab itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, diantara kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak dan isteri serta harta benda dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan serta hak dan kewajiban para pihak, maka syarat dan rukun perkawinan baik menurut UU No. 1 tahun 1974 maupun KHI harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu, hukum yang dibuat oleh badan tertentu dalam suatu negara atau yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat akan secara efektif berfungsi mewujudkan ketertiban dan keadilan manakala perilaku anggota dalam masyarakat sesuai dengan hukum itu.⁶

Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap status anak. Anak-anak tetap sebagai anak sah dan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Perkawinan yang telah dibatalkan tetap menimbulkan akibat hukum terhadap suami isteri, maupun terhadap anak-anak mereka, jika perkawinan tersebut

⁶Anna Triningsih, "*Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil law dan Common Law)*", Jurnal Konstitusi, Vol. 12 Nomor 1, Maret 2015, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, h. 142.

dilangsungkan dengan itikad baik. Berdasarkan pengertian tersebut pada intinya menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi walaupun perkawinan kedua orang tuanya oleh pengadilan telah diputuskan dibatalkan, akan tetapi putusan Pengadilan tidak memengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan mereka tetap dianggap anak sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah.

Bagi anak-anak yang orang tuanya yang telah dibatalkan perkawinannya, mereka masih mempunyai hak yang tetap, merupakan anak sah dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pada prinsipnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, hak beribadah, berpikir dan berekspresi. Hak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh akta kelahiran dan hak waris.

Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak. Perlindungan anak dalam hukum positif ada tiga aspek hukum yang mengatur, yaitu: *Pertama* hukum administrasi negara hak anak adanya pengakuan sebagai warga negara. *Kedua*, aspek hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Ketiga*,

aspek hukum pidana adalah perlindungan anak yang dari tindakan kekerasan dan deskriminasi.⁷

Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari beberapa pihak yang terkait, karena berdampak terhadap anak dan isteri. Anak yang tentunya banyak menjadi korban akibat perkawinan orang tua yang dibatalkan, sehingga pihak-pihak tersebut perlu memperhatikan nasib, sehingga anak tidak menjadi korban. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Karena anak yang lahir perlu diperhatikan kesejahteraannya karena anaklah yang menanggung semua akibat dari pembatalan perkawinan orang tuanya.

Apabila dalam hubungan suami istri telah terjadi pembatalan perkawinan. Setelah itu, pasangan tersebut melakukan kembali pernikahan siri dan dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak maka status anak tersebut menurut hukum Islam tetap anak sah. Sebelum adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, anak hasil nikah siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga dari ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, apabila pasangan suami istri ini melahirkan seorang anak tanpa melakukan pernikahan kembali maka status anak dari hasil hubungannya menurut

⁷S. Turatmiyah, M. Syaifuddin, A. Novera, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*, Jurnal Hukum IUS QUIA, No. 1 Vol 22 Januari 2015, h. 174.

Islam dianggap tidak sah (anak luar nikah). Karena sebelumnya kedua belah pihak telah melakukan pembatalan perkawinan dan sama halnya dengan mereka melakukan hubungan tanpa adanya ikatan yang halal dari segi agama.⁸

b) Akibat hukum terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan dan kewajiban para pihak.

Sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah.

Dilihat dari asal-usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan:⁹

1. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.

⁸Wawancara dengan Ibu Nadira, Hakim Pengadilan Agama Makassar , pada tanggal 22 Maret 2017.

⁹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, t.th), h. 83-84.

3. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.

Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:

- a. Harta milik bersama
- b. Harta milik seseorang tetapi terikat oleh keluarga
- c. Harta milik seseorang dan pemilikan tegas oleh yang bersangkutan.

Hakim pengadilan Agama Makassar “Sehubungan dengan adanya pembatalan perkawinan, maka hubungan suami isteri berakhir dan terhadap harta pribadi masing-masing suami dan isteri tidak berubah dan tetap menjadi hak miliknya. Terhadap seseorang yang sudah dibatalkan pernikahannya tidak ada lagi yang namanya harta bersama.¹⁰ Hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian itu harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.

c) Akibat Hukum Terhadap Hubungan Suami Istri

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan bahwa status hubungan suami istri dari pembatalan perkawinan itu sendiri yaitu status perkawinannya dianggap tidak pernah ada setelah diputuskan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat

¹⁰Wawancara dengan Ibu Nadira, Hakim Pengadilan Agama Makassar , pada tanggal 22 Maret 2017.

berlangsungnya perkawinan. Hal inilah yang membedakan antara perceraian dan pembatalan perkawinan. Perceraian pernikahannya dianggap pernah ada akan tetapi pembatalan perkawinan pernikahannya dianggap tidak pernah ada walaupun awal pernikahannya itu sah. Dan diharamkan bagi mereka yang perkawinannya telah dibatalkan untuk melakukan hubungan suami istri.¹¹

Hal tersebut sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

¹¹Wawancara Hakim Pengadilan Agama Makassar, 22 Maret 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan pemanggilan, pemeriksaan dan putusnya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan. Prosedur yang dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu: Pengajuan gugatan; Penerimaan Perkara; Pemanggilan dan Persidangan.
2. Penyebab sehingga terjadi pembatalan perkawinan yang diproses di Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2336/Pdt.G/2016/PA.MKS dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perkawinan dan sudah tercatat dalam Akta Nikah yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Tamalate. Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan perkawinan tanpa seizin istri pertama, tanpa izin dari Pengadilan dan melakukan pemalsuan identitas.
3. Segala hal yang menyangkut tentang administrasi Negara dengan adanya pembatalan perkawinan semua administrasi batal dengan adanya pembatalan perkawinan. Akibat hukum yang timbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan mulai dari Status Anak tidak berlaku surut dengan demikian anak

dianggap anak sah meskipun orang tuanya ada yang beritikad baik atau beritikad buruk. Kedua untuk harta yang diperoleh selama perkawinan itu tidak ada lagi yang namanya harta bersama hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, apabila pihak beritikad baik dirugikan yang menanggung adalah pihak yang beritikad buruk. Dan status perkawinan seseorang yang sudah dibatalkan perkawinannya itu tidak ada lagi hubungan perkawinannya dianggap tidak pernah ada dan diharamkan bagi mereka yang perkawinannya telah dibatalkan untuk melakukan hubungan suami istri

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Hendaknya kepada para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan, sebaiknya terlebih dahulu mengecek keadaan sesungguhnya atau identitas dari seseorang yang akan dinikahi baik itu laki-laki dan perempuan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Bagi mahasiswa, skripsi ini semoga dapat memberikan referensi baru bagi penelitian selanjutnya. Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan. Oleh sebab itu, peneliti menghimbau kepada mahasiswa lain yang berminat untuk meneliti pembatalan perkawinan hendaknya lebih memahami lebih mendalam sehingga dalam menganalisis data dapat menghasilkan data akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amonymous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Ali, Muhammad daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Aulia Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam, Cet III* . Jakarta; Nuansa Aulia, 2012.
- Ahmad ibn Hambal Abu ‘Abdullah Al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal*, Juz. XXV. Beirut: Muassasah Risalah, 1995 M/1416 H.
- Al-Imam Muslim, *Shahih Muslim*. Jakarta: Klang Book centre, 2007.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: CV Dipenogoro, 2008.
- Departemen Agama RI. *Bahan Peyuluhan Hukum. Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam*, 1999.
- Departemen Pendidikan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- [http:// id.m. wikipedia.orng/wiki/perkawinan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/perkawinan) (Diakses 22 mei 2017)
- [http://id.m.wikipedia.org/wiki/kartu Tanda Penduduk](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kartu_Tanda_Penduduk). (8 Juni 2017)
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/kartu_Keluarga. (8 Juni 2017)
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.
- Istiqamah. *Hukum Perdata di Indonesia*. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Martokusumo, Sudikn. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Marwan Muhlis, Mangkupanoto Thoyib. *Hukum Islam II*. Surakarta: Fakultas Hukum, 1986.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawina dalam Perspektif Islam dan Hukum Nasional, Cet I*. Makassar: Alauddin Press, 2014.
- Republik Indonesia. UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Niniek Supami KUHPerdata. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Rohim, Abdul. *Kedudukan Hukum Perjanjian sebagai Alasan Perjanjian, Masalah-Masalah Hukum, Jilid IV*. Semrang: F.H Universitas Dipenogoro, 2012.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Silalahi, Ulbert. *Studi tentang Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Subekti Winenarsih Imam dan Mahdi Sri Soesilawati. *Hukum Perorangan dan Keluarga Perdata Barat, Cet I*. Jakarta: Gitama Grafika, 2006.
- Samin Sabri, Aroeng Andi namnya. *FIKIH II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta; Kencana, 2010.
- Soekarto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; UII Press, 1986.
- Sutrisnohadi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
- Sutopo. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002.
- Suwardi Endarsawara, *Penelitian Kebudayaan: Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Melton Putra, 2003.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, t.th.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Turatmiyah, syarifuddin dkk. *Pembatalan Perkawinan serta Akibat Hukumnya dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam*, Jurnal Simbur Cahaya XXIII.No.56, 2015.

Trisningsih, Anna. *Pengadilan sebagai Lembaga Penegakan Hukum (perspektif Civil Law dan Common Law)* Jurnal Konstitusi, Vol.12.No.7, maret 2015, Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta: T.th

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di PA Sumatera Selatan, Jurnal Hukum IUS QUIA No. 1 Vol. 22. (22 januari 2015)

Zubaedah Siti dkk, *Himpunan Perturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta: T.p, 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi







PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 Daya Makassar
Telp. : 0411-4794556 Fax : 0411-4794557 Website : www.pa-makassar.net;
E-mail : pamakassar@yahoo.co.id, keu.pa.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90243

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : W20-A/2566/PB.00/VI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Makassar Klas IA menerangkan bahwa :

Nama : **Mutia Sulfianti**
NIM : 10400113066
Program : Strata (S1)
Program Studi : Perbandingan Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Judul Skripsi : **"Tinjauan Administrasi Negara Terhadap Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)"**

adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) pada kantor Pengadilan Agama Makassar Klas IA.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 Juni 2017



Ketua,
Drs. H. Damsir, S.H., M.H.
NIP. 195902151987031003

No. Indeks	B24	Tanggal diterima	16/03/2017	Kode	PP 00.9
Isi Ringkas	Permohonan Ijin penelitian An. Mutia Sulfianti				
Jenis Surat	Biasa	Dari	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar		
Kepada	KPA Makassar	Tanggal Surat	15/03/2017	Nomor Surat	1275
Isi Disposisi	Literasi dan keparipatutan	Pengantar	Penerima	Pengirim	Pengantar
<p><u>/ Ahmad Husein</u></p> <p>1. Bani barak uau dala 2 yg diperlukan 2. Pendaftar Bpk. Ibu Nadiah B. ²²/₃₋₁₇</p>					
Sesudah digunakan harap dikembalikan					
Kepada					
Tanggal					
Mohon untuk tidak menyalahgunakan surat ini					

PENGESAHAN DRAFT PROPOSAL

Nama : Mutia Sulfianti

Nim : 10400113066

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Administrasi Negara Terhadap Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)

Samata, 4 April 2017

Penyusun



Mutia sulfianti

NIM: 10400113066

Penasehat Akademik



Dr. Abdullah Mustari, M.Ag

NIP: 19730710 200003 1 004

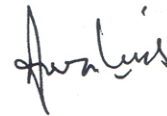
Pembimbing I



Dr. Sohran, M.Ag

NIP. 19610121 199203 2 003

Pembimbing II

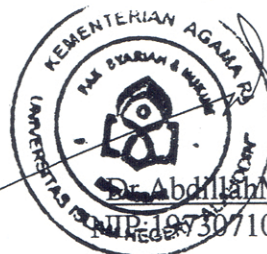


Awaliyah Musgany, S. Ag., M.Ag

NIP. 19770801 200312 1 002

Mengetahui

Kajur/Sekjur



Dr. Abdullah Mustari, M.Ag

NIP: 19730710 200003 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara **MUTIA SULFIANTI, NIM: 10400113066** mahasiswa jurusan Perbandingan MAzhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah mengoreksi secara seksama skripsi dengan judul **TINJAUAN ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk mengikuti Seminar Hasil.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.

Pembimbing I



Dr. Sohrah, M.Ag
NIP. 19610121 199203 2 003

Pembimbing II



Awaliyah Musgamy, S. Ag. M. Ag
NIP. 19770801 200312 1 002

Mengetahui

Kajur/Sekjur



Dr. Abdillah Mustari, M.Ag
NIP:19730710 200003 1 004

Nomor : SI.1/PP.00.9/2206 /2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN SEMINAR HASIL

Samata, 06 Juli 2017

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
 2. Dr. Abdillah Mustari, M.Ag. (Sekretaris)
 3. Prof. Hj. St. Aisyah Kara, M.A., Ph.D. (Penguji I)
 4. Dr. H. Halim Talli, M.Ag. (Penguji II)
 5. Dr. Sohrah, S.Ag., M.Ag. (Pembimbing I)
 6. Awaliah Musgany, S.Ag., M.Ag. (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :


Nama : Mutia Sulfianti
NIM : 10400113066
Jurusan : Perbandingan Mazhab & Hukum (PMH)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2017
Waktu : Pukul 13.00–14.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan PMH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Pembimbing dan penguji ujian hasil penelitian skripsi saudara **Mutia Sulfianti** , NIM **10400113066** mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara saksama skripsi yang berjudul, “ **Tinjauan Administrasi Negara Terhadap Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)**”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang **Munaqasyah**.

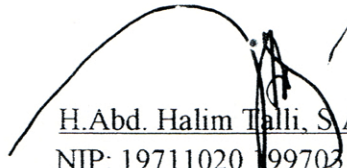
Dengan persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Penguji I



Prof. Hj. St. Aisyah Kara, M.A., Ph.D.
NIP: 19601231 19 92 03 2 105

Penguji II



H. Abd. Halim Tali, S. Ag., M. Ag
NIP: 19711020 199703 1 002

Pembimbing I



Dr. Sohrah, M. Ag
NIP: 19610121 199203 2 003

Pembimbing II



Awaliah Musgamy, S. Ag., M. Ag
NIP: 19750822 200604 2 002



Kampus I :Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M.Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 820 Tahun 2017

**TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
 N a m a : Mutia Sulfianti
 N I M : 10400113066
 Jurusan : Perbandingan Mazhab & Hukum (PMH)
 Hari/Tanggal : Selasa / 11 Juli 2017
 Perihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
 Judul : "Tinjauan Administrasi Negara Terhadap Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;

b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;

c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. Abdillah Mustari, M.Ag.
Penguji I : Prof. Hj. St. Aisyah Kara, M.A., Ph.D
Penguji II : Dr. H. Halim Talli, M.Ag
: 1. Mujahidah, SE
: 2. Nurhayati Wahid

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil /Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 06 Juli 2017

Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN

MAKASSAR

Nomor : 125 Tahun 2017

TENTANG

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca

Surat Permohonan :
Nama : Mutia Sulfianti
N I M : 10400113066
Jurusan : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Hari/Tanggal : Senin, 21 Agustus 2017
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Tinjauan Administrasi Negara Terhadap Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus pengadilan Agama Makassar)"

Menimbang

- Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
- Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
- Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
- Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
- Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
- Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. Abdillah Mustari, M.Ag.
Penguji I : Prof. Dr. Hj. St. Aisyah Kara, M.A
Penguji II : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag
Pelaksana : 1. Mujahidah, S.E.
2. Nurhayati Wahid

Ketiga

Keempat

- : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

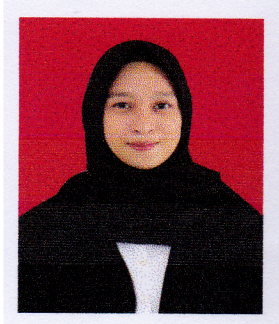
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



: Samata
: 16 Agustus 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

RIWAYAT HIDUP



MUTIA SULFIANTI, Lahir di Bantaeng pada 29 Oktober 1995, merupakan anak pertama dari dua orang bersaudara dari pasangan Bapak Baharuddin dan Ibu Salmah.

Riwayat pendidikan. Jenjang pendidikan penulis ditempuh mulai dari SD Inpres Kamp.Beru, Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng selama 6 Tahun pada Tahun dan tamat pada tahun 2007. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tepatnya di SMP NEG 2 GANTARANGKEKE Kabupaten Bantaeng selama 3 Tahun dan tamat pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pada wilayah yang berbeda yaitu SMA NEGERI 2 BANTAENG selama 3 tahun dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama 2013 penulis melanjutkan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Fakultas Syari'ah dan Hukum dan selesai pada tahun 2017.